



# **RENCANA KERJA TAHUN 2025**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK  
KABUPATEN BANGKA**

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka	Minggu I Desember 2023		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	Minggu I Desember 2023 – Minggu I Februari 2024	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2023	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	1 Februari 2024		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	10-31 Januari 2024		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	5-8 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua Februari 2024	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	12 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2024	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	12 Februari-11 Maret 2024		Seluruh PD
8	Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Bappeda)	4-6 Maret 2024	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Bappeda
9	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda dan Perbaikan oleh Perangkat Daerah	1-18 Maret 2024		Bappeda dan Seluruh PD
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	18 – 21 Maret 2024		Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	2 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD	3 Juli 2024		Bappeda
13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	3-11 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	15-26 Juli 2024	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	26-29 Juli 2024		Bappeda
16	Penetapan Renja PD melalui Perbup	30 Juli 2024	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat  
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 95336  
E-mail : dinkominfotik@bangka.go.id Website: bangka.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR : 188.45/ 854 /DINKOMINFOTIK/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025 PADA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN**  
**BANGKA**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana kerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Tim penyusunan rencana kerja Tahun 2025;
- c. Bahwa nama Tim penyusunan rencana kerja Tahun 2025 sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemetintah Daerah
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005- 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
37. Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka;
38. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
39. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).
40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2025.
41. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/1376/BAPPEDA/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim penyusunan rencana kerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
pada tanggal : 30 Juli 2024



**Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda/ IVc**  
**NIP. 19660819 199603 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka di Sungailiat
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka di Sungailiat
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka di Sungailiat
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka di Sungailiat
5. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kabupaten Bangka  
Nomor : 188.45/ 854 /DINKOMINFOTIK/2024  
Tanggal : 30 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BANGKA

NO	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Jabatan dalam TIM	Ket
1	Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si NIP. 19660819 199603 1 002	KEPALA DINAS	Pembina Tk.I (IV/b)	Penanggung Jawab	--
2	MAS AGUS ZULFAN, A.KS NIP. 19661115 199303 1 008	Plt. SEKRETARIS	Pembina (IV/a)	Ketua	--
3	KUSMIRI NIP. 19690622 198903 1 001	PERENCANA AHLI MUDA	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	--
4	SUHARMAN, SE NIP. 19690819 199603 1 002	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	Pembina (IV/a)	Anggota	--
5	FACHROBI, S.I.Kom NIP. 19831108 200604 1 003	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pembina (IV/a)	Anggota	--
6	DEVA ROSSIERA M, ST NIP. 19870317 201101 2 007	KEPALA BIDANG PERSANDIAN	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	--
7	MAS AGUS ZULFAN, A.KS NIP. 19661115 199303 1 008	KEPALA BIDANG STATISTIK	Pembina (IV/a)	Anggota	--

Ditetapkan di : Sungailiat  
pada tanggal : 30 Juli 2024



KEPALA DINAS,

Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19660819 199603 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini memuat laporan evaluasi dan capaian evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 terhadap Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 serta perumusan program dan kegiatan serta anggarannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja OPD dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad-Nya kepada kita semua, amin.

Sungailiat, 30 Juli 2024

Kepala Dinas,



**Drs. Teddy Sudarsono, M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19660819 199603 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud dan Tujuan .....	6
1.4    Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .....	8
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	26
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	28
2.4    Review Terhadap Rencana Awal RKPD.....	31
2.5    Penelaah Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....	38
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	43
3.3    Program dan Kegiatan .....	45
<b>BAB IV    RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1    Rencana Kerja.....	48
4.2    Pendanaan .....	58
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
5.1    Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.....	59
5.2    Kaidah Pelaksanaan.....	60
5.3    Rencana Tindak Lanjut .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan perencanaan perangkat daerah dilaksanakan secara bertahap dan simultan. Setelah penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja yang dimulai pada minggu kedua tahun sebelumnya, tahapan penyusunan perencanaan perangkat daerah memasuki tahapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan terakhir penyusunan Rancangan Akhir dan penetapan Rencana Kerja.

Penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan periode Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026, maka penyusunan Rancangan Renja Dinkominfo Tahun 2025 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 diperintahkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026. Penetapan Renstra tersebut paling lambat dilaksanakan pada minggu ke empat bulan Maret Tahun 2023. Selanjutnya Renstra Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Selain hal tersebut diatas, penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2025 juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Dinkominfo tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinkominfo Tahun 2025 telah selaras dengan rencana pencapaian sasaran Renstra Dinkominfo yang secara bersama-sama dengan penyusunan Renja dirumuskan. Renja Dinkominfo tahun 2025 juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86b Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfo) Kabupaten Bangka menyusun Renja Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappeda
- d. Perumusan Renja Perangkat Daerah
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025;

2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Dinkominfo Kabupaten Bangka disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 yaitu “ **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** ”.

Adapun makna dari tema tersebut adalah menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk lebih difokuskan memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengembalikan kemandirian sosial masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu kebijakan lintas sektoral yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan yang berfokus pada pemulihan industri (baik kecil, menengah dan besar), pariwisata dan kemudahan investasi berbasis teknologi informasi.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Diskominfo Kabupaten Bangka dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005- 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
37. Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka;
38. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
39. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).
40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2025.
41. Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/1376/BAPPEDA/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025, yaitu :

1. Tersedianya penjabaran Rencana Strategis Dinkominfo dan Statistik ke dalam Rencana Operasional Tahun 2025,
2. Terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan

tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinkominfotik;

3. Terlaksananya pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Rencana Kerja
- 4.2. Pendanaan

#### **BAB V. PENUTUP**

- 5.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan didalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka adalah penjabaran tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada 5 (lima) tahun sebelumnya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinkominfotik ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh dinkominfotik selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2023 Anggaran Belanja Langsung Dinkominfotik Kabupaten Bangka sebesar Rp.9.847.657.958,00 untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi keuangan sebesar Rp.9.094.635.413,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,35%.

Sementara itu, untuk pelaksanaan Tahun anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar **Rp.10.579.319.700,00** untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

### Tingkat Kinerja

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinkominfotik Tahun 2019-2023 dan diperjanjian secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian IKU Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023**

No	Indikator	Capaian 2022	Tahun2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 Terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yg terintegrasi	193,10	58,82	100,00	<b>170,01</b>	100,00	170,01
2.	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	103,18	BB (76,15)	BB (76,98)	<b>105,09</b>	100,00	105,09

Secara umum capaian kinerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinkominfotik Tahun 2019-2023 bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja atas indikator **“Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi “ dan “Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah ”** yang sesuai dengan RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Akan tetapi capaian ini tidak bersifat permanen. Apabila Dinkominfotik tidak berhati-hati dalam mengendalikan pencapaian kinerjanya maka

dapat dipastikan capaian kinerja atas semua indikator tersebut dapat menurun atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan gambaran Kinerja Tahun Kelima untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Perubahan Renstra Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka pada tahun 2023 tidak mengalami hambatan yang berarti, terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang terpenuhi, bahkan realisasi kinerja melampaui target. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di form berikut :

**Tabel T.C.29**  
**Rekaputilasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	29,25	29,00	29,25	29,25	100			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10,25	10,00	10,25	10,25	100			
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0	0	0	0	0	0		
		Indeks Profesionalisme Aparatur	67,10	67,00	67,10	67,10	100	68,00		
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	13,00	12,50	13,00	13,00	100			
		Indeks tata laksana organisasi perangkat daerah	4,50	4,25	4,50	4,50	100			
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah						3,90		
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah						12,75		
		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah						29,00		
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik						100,00		
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	29,00	100	100	100	100		
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	10,00	100	100	100	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	21	7	7	7	100	6		
2.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	36	12	12	12	100			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4		
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100		
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100	100	100	100	100	100		
2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100			
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun(laporan)	114	38	38	38	100			
		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)						26		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2		
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100	100	100	100	100	100		
2.16.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (stel)	48	16	16	16	100	1		
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100		
2.16.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang Tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						12		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penambahan aset Perangkat Daerah (%)</b>						<b>4,72</b>		
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan						1		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan						5		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan						4		
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang Dikelola sesuai peraturan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
2.16.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12		
2.16.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12		
2.16.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12		
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
2.16.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang tertangani (unit)	33	11	11	11	100	11		
2.16.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	3	1	1	1	100	1		
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik						78		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab	Persentase regulasi yang diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik (%)	98	67,14	67,14	67,14	100			
		Persentase Informasi dan Dokumentasi yang dikelola						100		
		Persentase Informasi publik yang disampaikan melalui media						100		
		Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti						100		
		Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia						100		
		Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi						25		
2.16.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disampaikan kepada	100	500	500	303	60,6			
		Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan						12		
	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis						4		
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya						2		
2.16.02.2.01.10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SARPRAS yang Tersedia (paket)	3	1	1	1	100			
		Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	9	3	3	2	66,67			
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi Program atau Kebijakan						67		
2.16.02.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	100	30	213,33	94	44,1			
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50	96,55	193			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan intra Pemerintah (JIP)						100		
		Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE						66,67		
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik						85		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						1		
2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Regulasi yang Diterbitkan di Bidang Tata Kelola TIK (%)	100	100	100	100	100			
		Nilai Domain kebijakan internal						2,25		
		Nilai Domain Layanan SPBE						2,25		
		Nilai Domain Tata Kelola SPBE						2,25		
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE (nilai)	3,1	2,7	3	1,85	61,67			
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (aplikasi)	15	5	5	6	120	0		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						1		
2.20.02	PROGRAM PPENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50,00	96,55	193			
		Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi						58,82		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	100	100	100	100	100	100		
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	15	5	5	5	100			
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi						1		
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun						34		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50,00	96,55	96,55			
		Indeks KAMI (Kematangan)						1		
2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab	Indeks KAMI (Kematangan)	2	1	1	0	1			
		Nilai Tata kelola Keamanan Informasi						1		
2.21.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan IT Security Assesment (aplikasi)	12	4	4	0	0			
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi						34		

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

*a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:*

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan output **Indeks KAMI**, realisasinya tidak ada.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan output **Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan ITSA**, realisasinya tidak ada.

*b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran:*

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023, program/kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan :
  - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
    - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan:
  - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:
  - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :
  - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

*c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran:*

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

*d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:*

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait

*e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD*

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra 2019 – 2023, secara umum seluruh

program/ kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

No	Program	Target	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
VI	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
VII	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
VIII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
IX	Program Pengembangan Persandian Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
X	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
III	Program Aplikasi Informatika	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab berdasarkan uraian pada sub bab 2.1.3, maka dapat diambil kebijakan / tindakan sebagai berikut :

1. Menyusun kembali program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Menyusun kembali penetapan target kinerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran tahun berjalan.

Adapun Tabel Hasil Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik s/d Tahun 2023 Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik s/d

**Tahun 2023 Kabupaten Bangka**  
**Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka**  
**Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			35.452.271.779		13.396.634.674		9.714.851.668			8.993.978.711		22.390.613.385		63,16	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP PD	29,25	17.946.899.179	28,80	7.998.613.174	29,25	5.383.574.978	29,25		4.767.117.726	29,25	12.765.730.900	100	71,13	DIN KOMINFOTIK
			Nilai aspek pelaporan	10,25		9,62		10,25			10,25		10,25		100		
			Persentase temuan	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		100		
			Indeks Profesionalisme	67,76		65,86		67,76			67,76		67,76		100		
			Indeks Tata Laksana	1,25		1,05		1,25			1,25		1,25		100		
			Persentase Pemenuhan	100		90,00		100			100		100		100		
			Indeks Sarana dan	100		90,00		12,75			12,75		12,75		12,75		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	163.189.004	100	127.054.849	100	130.334.320	100		129.329.048	100	256.383.897	100	157,11	DIN KOMINFOTIK
			Persentase Pelaporan	100		100		100			100		100		100		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	21	33.099.669	14	74.496.199	6	53.834.320	100	6	53.516.225	20	128.012.424	95,24	386,75	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	5	22.750.000			5	19.850.000	60,00	3	19.575.000	3	19.575.000	60,00	86,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	2	7.050.000			2	7.050.000	50,00	1	7.050.000	1	7.050.000	50,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2	11.150.000			2	11.150.000	50	1	10.737.823	1	10.737.823	50,00	96,30	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	2	11.150.000			2	11.150.000	50,00	1	11.150.000	1	11.150.000	50,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan	60	51.139.335	40	52.558.650	4	7.050.000	50,00	2	7.050.000	42	59.608.650	70,00	116,56	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	8	26.850.000			8	20.250.000	62,50	5	20.250.000	5	20.250.000	62,50	75,42	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun	100	12.996.982.883	100	5.583.304.513	100	3.454.509.143	100		2.944.823.710	100	8.528.128.223	100	65,62	DIN KOMINFOTIK
			Persentase	100		100	-	100			100		100		100		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan	36	12.974.932.883	24	5.583.304.513	12	3.432.459.143	100	12	2.923.486.961	36	8.506.791.474	100,00	65,56	
			Jumlah Laporan Keuangan	114		76	-	38		100	38	-	114	-	100,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	22.050.000			2	22.050.000	100	2	21.336.749	2	21.336.749	100,00	96,77	



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Memperoleh Sertifikat	52,00	133.950.000	18,00	9.800.000	52,00	56.093.180	52	56.093.180	18,00	65.893.180	34,62	49,19	DIN KOMINFOTIK
			Persentase Aparatur yang	100		100	-	100		100		100		100		
			Persentase aparatur yang	100		100	-	100		100		100		100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	48	33.950.000	16	9.800.000	1	9.750.000	100	9.750.000	17,00	19.550.000	35,42	57,58	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (kali)	15	100.000.000	0	-	5	46.343.180	100	46.343.180	5,00	46.343.180	33,33	46,34	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	604.457.880	100	327.437.907	100	308.652.355	100	303.640.033	100	631.077.940	100	104,40	DIN KOMINFOTIK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	36	589.007.880	24	327.437.907	12	293.202.355	100	291.170.041	36	618.607.948	100,00	105,03	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	12	15.450.000			12	15.450.000	100	12.469.992	12	12.469.992	100,00	80,71	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat daerah	80,00	427.543.650	70,00	-	80,00	352.543.650	80,00	322.745.000	70,00	322.745.000	87,50	75,49	DIN KOMINFOTIK
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	1	277.050.000			1	277.050.000	100	248.845.000	1	248.845.000	100,00	89,82	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	3	75.000.000	0	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1	75.493.650			1	75.493.650	100	73.900.000	1	73.900.000	100,00	97,89	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang	100	2.832.868.962	100	1.659.931.505	100	676.539.140	75,00	624.328.707	100	2.284.260.212	100	80,63	DIN KOMINFOTIK
			Jumlah Aspek Layanan	5		3	-	2		2		3		60,00		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	36	2.068.824.475	24	1.232.070.628	12	425.364.770	100	417.574.962	36	1.649.645.590	100,00	79,74	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan	36	449.132.742	24	273.111.365	12	173.524.500	100	130.568.209	36	403.679.574	100,00	89,88	
			Jumlah Layanan Updating	36		24	-	0		0,00	0	-	24	-	66,67	
			Jumlah Layanan Updating	36		24	-	0		0,00	0	-	24	-	66,67	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	36	314.911.745	24	154.749.512	12	77.649.870	100	76.185.536	36	230.935.048	100,00	73,33	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	787.906.800	100	291.084.400	100	404.903.190	100	386.158.048	100	677.242.448	100	85,95	DIN KOMINFOTIK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	33	467.769.200	22	258.956.900	11	175.031.190	100	162.882.618	33	421.839.518	100,00	90,18	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	3	89.237.600	2	32.127.500	1	29.272.000	100	23.112.800	3	55.240.300	100,00	61,90	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	230.900.000	0	-	1	200.600.000	100	200.162.630	1,00	200.162.630	33,33	86,69	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										91,55		88,55		74,93	78,72	
Predikat Kinerja										ST		T		S	T	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik (%)	100	8.573.649.400	100	3.356.455.412	100	1.676.878.710	100		1.646.992.731	200	5.003.448.143	200	58,36	DIN KOMINFOTIK
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98,00	8.573.649.400	78,61	3.356.455.412	98,00	1.676.878.710	98		1.646.992.731	176,61	5.003.448.143	180,21	58,36	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil	1000	4.525.547.900	600	429.089.449	1	216.865.000	100	1	200.125.000	601	629.214.449	60,10	13,90	
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil	2	21.490.000			2	21.490.000	100	2	18.492.473	2	18.492.473	100,00	86,05	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SAPRAS yang Tersedia (paket)	3	1.366.165.000	2	874.119.596	0	565.957.610	0,00	0	557.200.543	2	1.431.320.139	66,67	104,77	
			Jumlah Sumber Daya	9		3	-	12		100	12	-	15		166,67		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam	100	2.660.446.500	60	2.053.246.367	3	872.566.100	100	3	871.174.715	63	2.924.421.082	63,00	109,92	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00		98,22			77,95	78,66	
Predikat Kinerja										ST		ST			T	T	
3	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang	58,82	8.931.723.200	54,38	2.041.566.088	58,82	2.654.397.980	58,82		2.579.868.254	58,82	4.621.434.342	100,00	51,74	DIN KOMINFOTIK
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	58,82	1.930.326.400	0,00	-	58,82	1.930.326.400	58,82		1.890.402.015	58,82	1.890.402.015	100,00	97,93	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemda	40	1.930.326.400			40,00	1.930.326.400	100	40	1.890.402.015	40,00	1.890.402.015	100,00	97,93	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Regulasi yang Diterbitkan di Bidang Tata Kelola TIK (%)	100	7.001.396.800	100	2.041.566.088	100	724.071.580	100		689.466.239	100,00	2.731.032.327	100	39,01	
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,1	5.671.623.550	1,85	1.962.705.989	4	101.350.000	100	4	90.091.512	5,85	2.052.797.501	188,71	36,19	
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem	1	160.873.250			1	380.873.250	100	1	367.265.814	1	367.265.814	100,00	228,30	
		Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	15	1.127.180.000	10	78.860.099	1	200.128.330	100	1	191.425.059	11	270.285.158	73,33	23,98	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan	1	41.720.000			1	41.720.000	100	1	40.683.854	1	40.683.854	100,00	97,52	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100		97,19			112,41	96,16	
Predikat Kinerja										ST		ST			ST	ST	



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									9.714.851.668				8.993.978.711		22.390.613.385				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Komunikasi dan Informatika (%)									97,18				92,58				88,43	63,16	
Predikat Kinerja Seluruh Program Uruan Komunikasi dan Informatika									ST				ST				T	R	
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK			955.613.840		33.400.600		84.042.290			61.533.768		94.934.368			9,93		
1		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Data Statistik Daerah	100	955.613.840	100	33.400.600	100	84.042.290	100		61.533.768		200	94.934.368	200	9,93	DIN KOMINFOTIK	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	100	955.613.840	100	33.400.600	100	84.042.290	100		61.533.768		100	94.934.368	100	9,93		
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	15	912.322.700	10	33.400.600	34	40.377.100	100	34	29.417.000		44	62.817.600	293,33	6,89		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Statistik Daerah yang Terintegrasi	34	43.291.140			34	43.665.190	100	34	32.116.768		34	32.116.768	100,00	74,19		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100			73,22				293,33	9,93		
Predikat Kinerja									SR			SR				ST	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN STATISTIK									84.042.290				61.533.768		94.934.368				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik(%)									100			73,22				293,33	9,93		
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik									ST			S				ST	SR		
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN			1.092.216.950		38.492.681		48.764.000			39.122.934		77.615.615			7,11		
1	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tata Kelola Layanan Administrasi Pemerintahan dengan Manajemen yang	45,00	1.092.216.950	44,12	38.492.681	45,00	48.764.000	45,00		39.122.934		90,00	77.615.615	90,00	7,11	DIN KOMINFOTIK	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI (Kematangan)	2	1.092.216.950	1	38.492.681	2	48.764.000	2,00		39.122.934		3	77.615.615	3	7,11		
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang Telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34	1.092.216.950	8	38.492.681	34	48.764.000	100	34	39.122.934		42	77.615.615	123,53	7,11		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100			80,23				123,53	7,11		
Predikat Kinerja									SR			SR				SR	SR		



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERSANDIAN									48.764.000		39.122.934		77.615.615			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian (%)										100,00		80,23		123,53	7,11	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian										ST		T		ST	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINKOMINFOTIK									9.847.657.958		9.094.635.413		22.563.163.368			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinkominfotik (%)										98,31		92,35		136,43	54,12	
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinkominfotik										ST		ST		ST	R	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*) :																

\*) Diisi oleh Kepala Bappeda

KEPALA DINAS

DISUSUN  
Sungailiat, Januari 2024  
KABUPATEN BANGKA

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660819 199603 1 002

DIEVALUASI  
Sungailiat, Januari 2024  
KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661214 199203 1 004

### Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Instansi Pemerintah Daerah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Semua kegiatan di dalam Instansi Pemerintah Daerah yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya.
- b. Perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan.
- c. Risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam Instansi Pemerintah Daerah sehingga dampaknya terhadap organisasi Instansi Pemerintah Daerah sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.

Instansi Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Instansi Pemerintah Daerah dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas pada Instansi Pemerintah daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Instansi Pemerintah Daerah secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang.
- b. Sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam Instansi Pemerintah Daerah dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan.
- c. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau pengurangan yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud, dan tujuan strategis.
- d. Sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional.
- e. Risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat Instansi Pemerintah Daerah akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru.
- f. Risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan pada Instansi Pemerintah Daerah di suatu area geografis baru sudah ditetapkan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tahun 2023 Dinkominfotik Kabupaten Bangka menyelenggarakan 3 (tiga) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Unsur Komunikasi dan Informatika, Unsur Persandian serta Unsur Statistik. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel T.C 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka**  
**Tahun 2023 – 2026**

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (73,25)	BB (76,15)	BB (80,00)	A (82,00)	BB (76,15)	-	BB (80,00)	A (82,00)	
2	Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yg terintegrasi	58,82	-	-	-	100	-	-	-	
3	Persentase layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	-	66,67	83,33	100	-	-	83,33	100	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	78,00	80,00	82,00	-	-	80,00	82,00	

Dalam pencapaian target kinerja Dinkominfotik 2023 dapat disimpulkan hal-hal bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target sampai dengan tahun 2023 yaitu ***“Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yg terintegrasi”*** yang sesuai RPJMD.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota

### IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{1,2998189}{1,4280645} \times 100\%$ = 91,01%	LRA Kab.Bangka TA 2022	

**IKK Outcome : Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{111}{111} \times 100\% = 100\%$	Bank Data	

## 2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

**IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{26}{34} \times 100\% = 76,47\%$	Bidang E-Government	

**IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{58}{58} \times 100 = 100\%$	Bidang IKP	

**IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{228332}{327336} \times 100\% = 69,75\%$	Bidang IKP	

## 3. Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota

**IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$	Bidang Persandian	

#### 4. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten/Kota

**IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN STATISTIK	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	$\frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$	Bidang Statistik	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Pusat Data Nasional
2. Satu Data Indonesia
3. Keamanan Informasi
4. Pengelolaan Isu Publik perihal program prioritas daerah

#### 2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi melalui proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan
- d. Belum Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data

#### 2.3.2 Dampaknya terhadap Pencapaian pembangunan daerah terhadap Capaian Program Nasional dan SDGs

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Bangka yaitu **“Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel”** dengan sasaran pembangunan **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik”** yang didukung oleh program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

yaitu Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Dalam mendukung SDGs dinas komunikasi dan informatika pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bangka dengan tujuan :

1. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, dengan indikator; Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
2. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, dengan indikator; Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
3. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi, dengan indikator :
  - a. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
  - b. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
  - c. Proporsi individu yang menggunakan internet
4. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, dengan indikator Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan indikator
  - a. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
  - c. Proporsi individu yang menggunakan internet.
  - d. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam meningkatkan pelayanan urusan komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Mengaktifkan Komunitas Informasi Masyarakat menjadi garda pertama edukasi digital dilingkup lokal kampung/desa

2. Menjembatani dan meningkatkan peran PPID Desa bagi keterbukaan informasi publik
3. Pelaksanaan evaluasi SPBE yg terlalu singkat
4. Kurangnya partisipasi OPD terkait indeks SPBE seta kurang konsisten dengan Program yg sdh dipilih sebagai Quickwin
5. Ancaman siber yang terus berkembang, pelaku kejahatan siber mengembangkan teknik serangan yang lebih canggih dan terarah, seperti malware, ransomware
6. Kurangnya kesadaran keamanan informasi yang rendah dan keahlian tenaga keamanan informasi yang terampil dan berpengalaman masih kurang
7. Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Data Yang belum memadai
8. Minimnya Kualitas dan Kapabilitas Pengelola Data di setiap instansi Pemerintahan
9. Ego sektoral di setiap instansi pemerintahan

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
- c. Meningkatnya indeks SPBE serta pelayanan e-government
- d. Pembangunan Smart City terstruktur dan terarah sesuai dgn Masterplan Smart City
- e. Meningkatkan teknologi keamanan informasi dengan teknologi baru seperti AI, machine learning dapat digunakan untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan ancaman
- f. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi di kalangan pengguna dan tenaga ahli keamanan informasi melalui edukasi dan pelatihan keamanan informasi
- g. Tersedianya Platform Satu Data Indonesia
- h. Penyelenggaraan Statistik sektoral
- i. Peraturan Perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan statistik sektoral

#### **2.3.4 Rekomendasi dan Catatan yang Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025**

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengembangan Sistem Informasi berbasis IT dalam upaya Peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)
2. Melakukan pelatihan untuk meng-upgrade skill dan pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan e-government



3. Memaksimalkan pembinaan Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan serta asistensi pengelolaan informasi pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informatika
4. Meningkatkan kemampuan literasi media digital masyarakat serta mengelola persepsi publik dengan publikasi di berbagai media
5. Terus mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur E-government guna meningkatkan kualitas pelayanan public
6. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dengan didukung oleh sandiman yang kompeten.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### 2.4.1. Proses yang dilakukan

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal Renja 2025 pada Renstra 2024-2026 dengan rancangan akhir Renja 2025 (Permendagri nomor 90 tahun 2019).

### 2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses yang dilakukan

Dalam melakukan review terhadap Rancangan awal Renja 2025 dengan Permendagri 90 tahun 2019 adalah :

- a. Membandingkan antara rancangan awal Renja 2025 (pada Renstra 2024-2026) dengan rancangan akhir Renja 2025 (Permendagri 90/2019)
- b. Melakukan Pemetaan Program dan indikator program
- c. Melakukan pemetaan Kegiatan dan indikator program
- d. Melakukan pemetaan Sub Kegiatan dan indikator Sub Kegiatan
- e. Melakukan pemetaan Rekening Program dan kegiatan yang lama dan rekening baru

### 2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal.

Setelah melakukan pemetaan dengan membandingkan antara rancangan awal Renja 2025 (pada Renstra 2024-2026) dengan rancangan akhir Renja 2025 (Permendagri 90/2019) pada urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dapat disajikan tabel T.C 31 berikut ini.



**Tabel T.C 31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka**

Rancangan Awal RKPD TAHUN 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2025		
		Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	1	2	3	4	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.787.943.680	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.147.746.980	
	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	29	27.994.835		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	29	15.000.000	
	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10	20.000.000	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.994.835	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000	
	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	16.994.945		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	15.000.000	
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	10.999.890		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	20.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	7 Dokumen	10.999.890	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	7 Dokumen	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	20 Dokumen	16.994.945	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	20 Dokumen	15.000.000	

	Persentase temuan pengelolaan keuangan dalam LHP BPK-RI	0%	4.311.911.230		Persentase temuan pengelolaan keuangan dalam LHP BPK-RI	0%	3.919.919.300	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.311.911.230	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.919.919.300	
	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%			Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%		
	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%	4.311.911.230		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%	3.919.919.300	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan		
	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	38 Dokumen	4.311.911.230		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	38 Dokumen	3.919.919.300	
	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	4,25	1.137.179.615		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	4,25	1.030.067.680	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			941.436.815	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			891.587.650	
	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%			Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%		
	Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	2	941.436.815		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	2	891.587.650	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	687.524.750	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	648.853.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	149.258.615	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	142.526.650	
	Jumlah Layanan Updating website yang tertangani	12 Bulan			Jumlah Layanan Updating website yang tertangani	12 Bulan		
	Jumlah Layanan Updating Pengaduan Masyarakat yang tertangani	12 Bulan			Jumlah Layanan Updating Pengaduan Masyarakat yang tertangani	12 Bulan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	104.653.450	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	100.207.500	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			195.742.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			138.480.030	

	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	195.742.800		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	138.480.030	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang Tertangani	12 Bulan	195.742.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang Tertangani	12 Bulan	138.480.030	
	Jumlah Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang Tertangani	12 Bulan			Jumlah Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang Tertangani	12 Bulan		
	<i>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	12,5	1.185.108.000		<i>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	12,5	162.760.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			800.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		
	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	70%	800.000.000		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	70%	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	100.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	100.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur</i>	Jumlah mebel kantor yang diadakan	1 Paket	100.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur</i>	Jumlah mebel kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Paket	500.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Paket	-	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385.108.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			162.760.000	
	Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	385.108.000		Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	162.760.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	1 Paket	155.452.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	1 Paket	141.320.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	29.656.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	21.440.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhap	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhap	1 Unit	-	

	<i>Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah</i>	<b>67</b>	125.750.000		<i>Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah</i>	<b>67</b>	-	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125.750.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	
	Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	125.750.000		Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Adat yang Tersedia	66 Stel	65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Adat yang Tersedia	66 Stel	-	
	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya yang tersedia	66 Stel	48.750.000		Jumlah Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya yang tersedia	66 Stel	-	
	Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia	16 Stel	12.000.000		Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia	66 Stel	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5 Orang	-	
	<b>Indeks SPBE</b>	<b>3,1</b>			<b>Indeks SPBE</b>	<b>3,1</b>		
		<b>10</b>				<b>10</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.441.662.500	
	Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik	100%	3.500.000.000		Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik	100%	1.441.662.500	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.500.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.441.662.500	
	Persentase Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	100%	3.500.000.000		Persentase Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	100%	1.441.662.500	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	500 Konten	1.000.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	500 Konten	173.216.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sapras yang tersedia	1 Paket	500.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sapras yang tersedia	1 Paket	450.495.000	
	Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	3 Orang			Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	3 Orang		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	30 Media	2.000.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	30 Media	817.951.500	
	Jumlah KIM	25 KIM			Jumlah KIM	25 KIM		

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			1.530.035.820	
	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	50,00%	3.000.000.000		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	50,00%	1.530.035.820	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.000.000.000	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.530.035.820	
	Persentase Layanan Informasi Berbasis TIK	100%	3.000.000.000		Persentase Layanan Informasi Berbasis TIK	100%	1.530.035.820	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	3,1	2.500.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	3,1	1.465.875.820	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	500.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	64.160.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			425.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			27.706.650	
	Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu	100%	425.000.000		Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu	100%	27.706.650	
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			425.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			27.706.650	
	Persentase data Statistik Sektoral yang Digunakan Perangkat Daerah	100%	425.000.000		Persentase data Statistik Sektoral yang Digunakan Perangkat Daerah	100%	27.706.650	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	5 Data	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	5 Data	27.706.650	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Bersertifikat	1 Orang	25.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Bersertifikat	5 Data	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			36.700.000	

	Persentase Tata Kelola Layanan Administrasi Pemerintahan dengan Manajemen yang terdokumentasi dan Terstandarisi	40,00%	500.000.000		Persentase Tata Kelola Layanan Administrasi Pemerintahan dengan Manajemen yang terdokumentasi dan Terstandarisi	40,00%	36.700.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			36.700.000	
	Persentase Keamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	500.000.000		Persentase Keamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	36.700.000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang telah dilakukan IT Security Assesment	4 Aplikasi	500.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang telah dilakukan IT Security Assesment	4 Aplikasi	36.700.000	
			14.212.943.680				8.183.851.950	

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak terdapat penambahan jumlah program diluar Rancangan RKPD.
2. Tidak terdapat penambahan jumlah kegiatan diluar Rancangan RKPD.

Hasil analisis kebutuhan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penetapan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target kinerja serta batasan pagu yang akan dituangkan dalam Renja Dinkominfo Tahun 2025 dengan tetap mempedomani Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025.

### **3.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang di dalam RPJMD 2024-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2025 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

**Tabel T.C 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka**

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<p>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</p>	Desa Petaling, Kec. Mendo Barat	<p>Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE</p> <p>Nilai domain kebijakan internal</p> <p>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</p>	Rp. 50.000.000	Penambahan Jaringan Hotspot



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

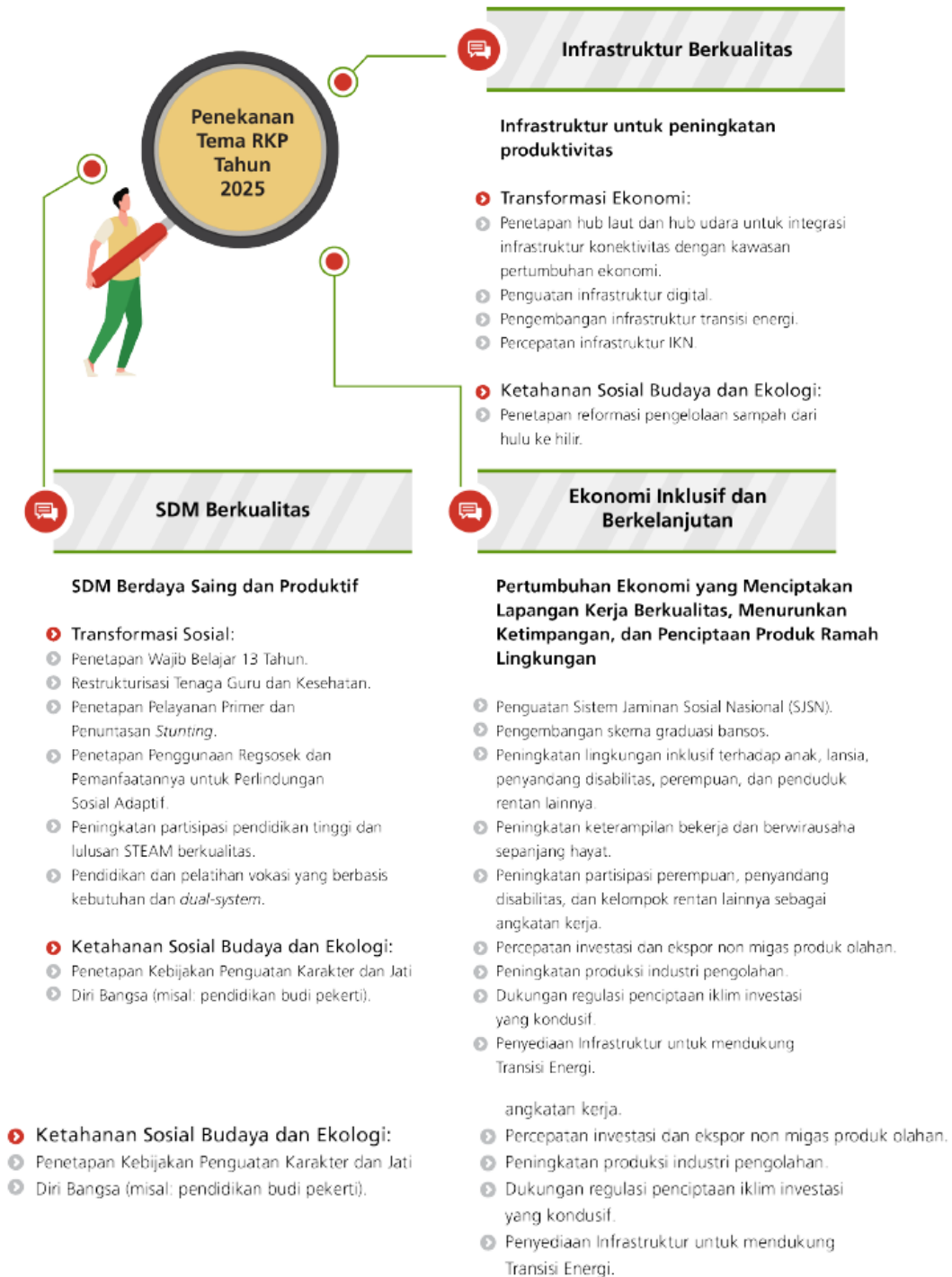
Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan yaitu :

- (1) SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
- (2) Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.
- (3) Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan kedalam 3 (tiga) fokus yaitu SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam komponen-komponen sebagaimana termuat pada Gambar di bawah ini

## Gambar

## Fokus Penekanan Tema dalam RKP Tahun 2025



Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan Tema “ **Penguatan Pembangunan Ekonomi untuk Daya Saing Daerah**”.

Dinkominfotik sebagai unsure penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1  
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan  
Kabupaten Bangka Tahun 2025

Nasional	Prov.Kep.babel	Kab.Bangka
1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa	1. Pembangunan Ekonomi	1. Penguatan kapasitas birokrasi
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga informasi pengelolaan sampah	2. Pembangunan wilayah	2. Penguatan sector-sektor ekonomi unggulan
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.	3. Pembangunan Lingkungan	3. Penguatan Sumber Daya Manusia
	4. Pembangunan SDM	4. Kesejahteraan dan perlindungan social
		5. Penguatan infrastruktur dan sumber daya air
		6. Pengelolaan lingkungan hidup

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berpedoman pada RKPD Kab.Bangka, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bersinergi

dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2019-2024, RKP Tahun 2025; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kep.Babel 2005–2025, RPD Provinsi Kep.Babel 2023–2026, RKPD Provinsi Kep.Babel 2025; dan RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka 2025.

Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatika 3 (tiga) tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2024—2026 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government Public Relations (GPR).

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Tema Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah “ **Penguatan Pembangunan Ekonomi untuk Daya Saing Daerah** “ dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu :

1. Penguatan Kapasitas Birokrasi
2. Penguatan Sektor-sektor Ekonomi Unggulan
3. Penguatan Sumber Daya Manusia
4. Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
5. Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Air
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka dukungan terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas dan dengan tetap mengacu kepada Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran beserta target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Dinkominfo pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan ke-3 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, yaitu Reformasi Birokrasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi.

**Tabel 3.2.**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Renja Dinkominfotik Tahun 2025**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2025
I.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi		Indeks SPBE	2,45
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	83,33
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00
II	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PD	33,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (80,00)

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;

- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinkominfo dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi
- 3) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing Bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinkominfo maupun Pemkab Bangka.

Program dan kegiatan dimaksud oleh Dinkominfotik Kab. Bangka telah disusun yang terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan sebagai berikut :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
  - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

## **II. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
  - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
  - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

## **III. Program Aplikasi Informatika**

1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

## **IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
  - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

## **V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Program-program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 mendukung prioritas pembangunan “Reformasi Birokrasi” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kab.Bangka

## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						10.579.319.700,00						11.122.436.900,00				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.579.319.700,00								11.122.436.900,00		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.267.027.380,00								10.820.144.580,00		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	0Persentase 30,00Nilai 100Persentase 4,10Indeks 13,50Nilai 72,00Indeks 82,00Nilai			0 Persentase 4,00 Indeks 13,00 Nilai 70,00 Indeks 100 Persentase 29,53 Nilai	6.137.905.710,00							0Persentase 30,00Nilai 100Persentase 4,10Indeks 13,50Nilai 72,00Indeks 82,00nilai	6.691.022.910,00		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100Persentase 100Persentase			100 Persentase 100 Persentase	204.324.220,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	100Persentase 100Persentase	204.324.220,00			
2	16	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokume n			6 Doku men	138.224.220,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	6 Dokumen	138.224.220,00	DINKOMINF OTIK
2	1 6	0 1	2.0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			4 Lapor an	66.100.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	4 Laporan	66.100.000,00	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMATI KA DAN STATISTIK
2	1 6	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100Pers entase			100 perse ntase	4.152.307.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	100Persentase	4.152.307.000,00	
2	1 6	0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/b ulan			29 Oran g/bula n	4.120.257.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	26 Orang/bulan	4.120.257.000,00	DINKOMINF OTIK
2	1 6	0 1	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokume n			12 Doku men	10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	12 Dokumen	10.000.000,00	DINKOMINF OTIK
2	1 6	0 1	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan			2 Lapor an	22.050.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	2 Laporan	22.050.000,00	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMATI KA DAN STATISTIK
2	1 6	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan	100Pers entase 100Pers entase 100Pers			100 Perse ntase 100 Perse	60.350.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	100Persentase 100Persentase 100Persentase	60.350.000,00	

						Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	entase			ntase 100 Perse ntase									
2	1 6	0 1	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	1 Paket	9.750.000,00	DINKOMINF OTIK
2	1 6	0 1	2.0 5	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokume n			1 Doku men	10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	1 Dokumen	10.000.000,00	DINKOMINF OTIK
2	1 6	0 1	2.0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang			29 Oran g	40.600.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	26 Orang	40.600.000,00	DINKOMINF OTIK
2	1 6	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100Pers entase			100 perse ntase	383.285.160,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	100Persentase	383.285.160,00	
2	1 6	0 1	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Lapor an	357.835.160,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	12 Laporan	357.835.160,00	DINKOMINF OTIK
2	1 6	0 1	2.0 6	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokume n			1 Doku men	10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	1 Dokumen	10.000.000,00	DINKOMINF OTIK
2	1 6	0 1	2.0 6	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	36 Dokume n			12 Doku men	15.450.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	12 Dokumen	15.450.000,00	DINKOMINF OTIK

						Berbasis Elektronik pada SKPD						Betung							
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	14,15Persentase			4,50Persentase	429.557.535,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	4,31 Persentase	982.674.735,00	
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit			12 Unit	138.980.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	5 Unit	138.980.000,00	DINKOMINFOTIK
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			1 Paket Unit	182.230.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	1 Unit	182.230.000,00	DINKOMINFOTIK
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	- Unit	0,00	DINKOMINFOTIK
2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	1 Unit	551.464.735,00	DINKOMINFOTIK
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit			2 Unit	108.347.535,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	- Unit	110.000.000,00	DINKOMINFOTIK
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	6 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	- Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI

						Lainnya yang Disediakan						Betung							KA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100Persentase			100Persentase	671.852.655,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	100Persentase	671.852.655,00	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36Laporan			12Laporan	421.800.435,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	12 Laporan	421.800.435,00	DINKOMINFOTIK
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36Laporan			12Laporan	173.150.450,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	12 Laporan	173.150.450,00	DINKOMINFOTIK
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36Laporan			12Laporan	76.901.770,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	12 Laporan	76.901.770,00	DINKOMINFOTIK
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75Persentase			75Persentase	236.229.140,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	75Persentase	236.229.140,00	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			12 Unit	174.657.140,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	12 Unit	174.657.140,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit			31 Unit	36.572.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK	31 Unit	36.572.000,00	DINKOMINFOTIK

2	16	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFO TIK		25.000.000,00	DINKOMINFO TIK
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85 Indeks			85 Indeks	1.727.241.670,00						85 Indeks	1.727.241.670,00	
2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaa	Persentase Informasi dan dokumentasi yang dikelola Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi	100Persentase 100Persentase 100Persentase 100Persentase 100Persentase			100Persentase 100Persentase 100Persentase 100Persentase 50Persentase	1.727.241.670,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat	100Persentase 100Persentase 100Persentase 100Persentase	1.727.241.670,00	
2	16	02	201	0017	Pelayanan Informasi Publik														
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	72 Permohonan			30 Permohonan	282.281.010,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat	30 Permohonan	282.281.010,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	201	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70 Media			70 Media	910.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	70 Media	910.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2	1	0	2.0	00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
	6	2	1	24		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	6 Orang			2 Oran g	534.960.660,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarak at	2 Orang	534.960.660,00	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMATI KA DAN STATISTIK
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAA N APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan intra Pemerintah (JIP) Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE	100Pers entase 100Pers entase 100%			100 Perse ntase 83,33 Perse ntase	2.401.880.000,00						100Persentase 100Persentase 100%	2.401.880.000,00	
2	1	0	2.0		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Nilai domain kebijakan internal Nilai Domain Layanan SPBE Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2.65Nilai 2.65Nilai 2.65Nilai			2.45 Nilai 2.45 Nilai 2.45 Nilai	2.401.880.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	2.65Nilai 2.65Nilai 2.65Nilai	2.401.880.000,00	
2	1	0	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
	6	3	2	21		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	15 Aplikasi			12 Aplika si	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	5 Aplikasi	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMATI KA DAN STATISTIK
2	1	0	2.0	00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
	6	3	2	24		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangk at Daerah			34 Peran gkat Daera h	2.391.880.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	2.391.880.000,00	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMATI KA DAN STATISTIK
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						166.370.230,00							166.370.230,00	
2	2	0			PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	79,41 %			79,41 %	166.370.230,00						79,41 %	166.370.230,00	



2	2	0	2.0		Penyelenggara an Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100Pers entase 100Pers entase			100 Perse ntase 100 Perse ntase	166.370.230,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	100Persentase 100Persentase	166.370.230,00	
2	2	0	2.0	00 07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
						Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	68 Orang			68 Oran g	166.370.230,00	Kab. Bangka, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	68 Orang	166.370.230,00	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMATI KA DAN STATISTIK
2	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						145.922.090,00							135.922.090,00	
2	2	1	0 2		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI	Indeks KAMI	1 Kemata ngan			1 Kema tanga n	145.922.090,00						1 Kematangan	135.922.090,00	
2	2	1	0 2	2.0 1	Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	1Nilai			1 Nilai	135.922.090,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	1Nilai	125.922.090,00	
2	2	1	0 2	2.0 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan			2 Lapor an	10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMATI KA DAN STATISTIK
2	2	1	0 2	2.0 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangk at Daerah			34 Peran gkat Daera h	125.922.090,00	Kab. Bangka, Semua Kecama tan, Bukit Betung	DTU- DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	115.922.090,00	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMATI KA DAN STATISTIK

2	2	0	2.0		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kot	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	1Nilai			1 Nilai	10.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	1Nilai	10.000.000,00	
2	2	0	2.0	00 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	34 Perangkat Daerah			34 Perangkat Daerah	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Bukit Betung	DTU-DAU	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
J U M L A H											10.579.319.700,00								11.122.436.900,00

#### 4.2. Pendanaan

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp. **10.579.319.700,00**.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 12 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

## BAB V

### PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinkominfotik Kabupaten Bangka disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 yaitu ***“Penguatan Pembangunan Ekonomi untuk Daya Saing Daerah”***, dan penjabaran dari tujuan Dinkominfotik Kabupaten Bangka yang tertuang dalam Renstra yaitu ***“Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi”***.

Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfotik Tahun 2025 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinkominfotik yang telah dituangkan dalam Renstra Dinkominfotik Tahun 2024-2026. Adapun tujuan Dinkominfotik adalah “Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi” yang didukung oleh dua sasaran yaitu: ***“Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi”*** dan ***“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data”***.

Pada tahun 2025 Dinkominfotik akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp. 10.579.319.700,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 12 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinkominfotik dan lingkup Kabupaten Bangka.

#### 5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Mengaktifkan Komunitas Informasi Masyarakat menjadi garda pertama edukasi digital dilingkup lokal kampung/desa
2. Menjembatani dan meningkatkan peran PPID Desa bagi keterbukaan informasi publik
3. Pelaksanaan evaluasi SPBE yg terlalu singkat
4. Kurangnya partisipasi OPD terkait indeks SPBE seta kurang konsisten dengan Program yg sdh dipilih sebagai Quickwin
5. Ancaman siber yang terus berkembang, pelaku kejahatan siber mengembangkan teknik serangan yang lebih canggih dan terarah, seperti malware, ransomware
6. Kurangnya kesadaran keamanan informasi yang rendah dan keahlian tenaga keamanan informasi yang terampil dan berpengalaman masih kurang
7. Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Data Yang belum memadai
8. Minimnya Kualitas dan Kapabilitas Pengelola Data di setiap instansi Pemerintahan
9. Ego sektoral di setiap instansi pemerintahan

## 5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2025, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Diskominfo Kabupaten Bangka haruslah berpedoman kepada RKPd dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

## 5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Melakukan revaluasi kegiatan untuk melihat progres pelaksanaan kegiatan, baik dari segi penjadwalan, faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Selain sebagai pedoman atau acuan kinerja, renja 2025 ini juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas, yang mengandung acuan, bahwa hasil dari setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.